

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 6 Juni 2017

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Drs. H.MAHMUD, S.H., M.H.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI - PENGADILAN TINGGI AGAMA
SULAWESI SELATAN
3. NHK : 78207
4. Tanggal Pelaporan : 27 September 2010, 20 Juli 2016

Status Laporan

	27 September 2010	20 Juli 2016
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 620.000.000	Rp. 700.000.000
1. Tanah & Bangunan seluas 90 m2 & 36 m2, di Kabupaten MAROS, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2000 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 50.000.000	----
2. Tanah seluas 7.000 m2, di Kabupaten MERAUKE, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1997 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 70.000.000	----
3. Tanah & Bangunan seluas 126 m2 & 65 m2, di Kota MAKASSAR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 500.000.000	Rp. 700.000.000
B. HARTA BERGERAK		

27 September 2010

20 Juli 2016

	27 September 2010	20 Juli 2016
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	----	----
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	----	----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 27.000.000	Rp. 25.000.000
1. BATU MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 2000 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 27.000.000	Rp. 25.000.000
C. SURAT BERTAHAGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 0	Rp. 0
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 647.000.000	Rp. 725.000.000
III. HUTANG	----	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 647.000.000	Rp. 725.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

